

## ANALISIS DAMPAK PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, ZAKAT DAN PDRB TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

<sup>1</sup> Ahmad Briezy Baihaqi, <sup>2</sup> Maria Puspitasari

<sup>1,2</sup> Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

Email korespondensi: [briezy.baihaqi@gmail.com](mailto:briezy.baihaqi@gmail.com)

### Abstract

Poverty, which is closely related to welfare, is one of national resilience scopes. National resilience guarantees the survival of the nation's life which is manifested through citizens' tough living conditions based on *trigatra* and *pancagatra*. Based on BPS Indonesia data, the Aceh's poor population percentage in 2007-2014 has always been above the national average and among the top ten provinces with the highest poverty rates in Indonesia. This study aims to determine the effect of the Unemployment Rate, HDI, ZIS; and GRDP per capita with oil and gas to the Poor Population Percentage in Aceh Province in 2009-2015. Using quantitative approach with panel data regression, results of the FEM processed with EViews 9 shows four independent variables have simultaneous and partial significant effect with an adjusted R-squared value of 95.11%. Every increase in Unemployment, ZIS and GRDP per capita by 1% will decrease the Poor Population Percentage. Every increase in HDI will increase the Percentage of Poor Population. Recommendations from the results of this study are that Aceh government should focus on poverty alleviation programs in rural areas in accordance with the 2008 BRR NAD-Nias report and also needs find a one-stop zakat mechanism so the potential of ZIS in Aceh Province can be realized as maximum as possible.

**Keywords:** : Gross Domestic Product; Human Development Index; Poverty; Unemployment; Zakat.

### Abstrak

Kemiskinan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan merupakan salah satu cakupan ketahanan nasional. Ketahanan nasional menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa yang diwujudkan melalui kondisi kehidupan warganya yang tangguh dengan berasaskan *trigatra* dan *pancagatra*. Berdasarkan data BPS Indonesia persentase penduduk miskin provinsi Aceh tahun 2007-2014 selalu berada di atas rata-rata nasional dan masuk sepuluh besar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran, IPM, ZIS; dan PDRB per Kapita dengan migas terhadap Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh tahun 2009-2015. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel, hasil FEM yang diolah dengan EViews 9 menunjukkan keempat variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial dengan nilai *adjusted R-squared* 95,11%. Setiap peningkatan pengangguran, ZIS dan PDRB sebesar 1% akan menurunkan Persentase Penduduk Miskin. Setiap peningkatan IPM akan meningkatkan Persentase Penduduk Miskin. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah Aceh perlu memfokuskan program pengentasan kemiskinan di daerah-daerah pedesaan sesuai laporan BRR NAD-Nias tahun 2008 dan juga perlu mencari mekanisme zakat satu pintu agar potensi ZIS di Provinsi Aceh bisa terealisasi semaksimal mungkin.

**Kata Kunci:** Indeks Pembangunan Manusia; Kemiskinan; Pengangguran; Pendapatan; Zakat

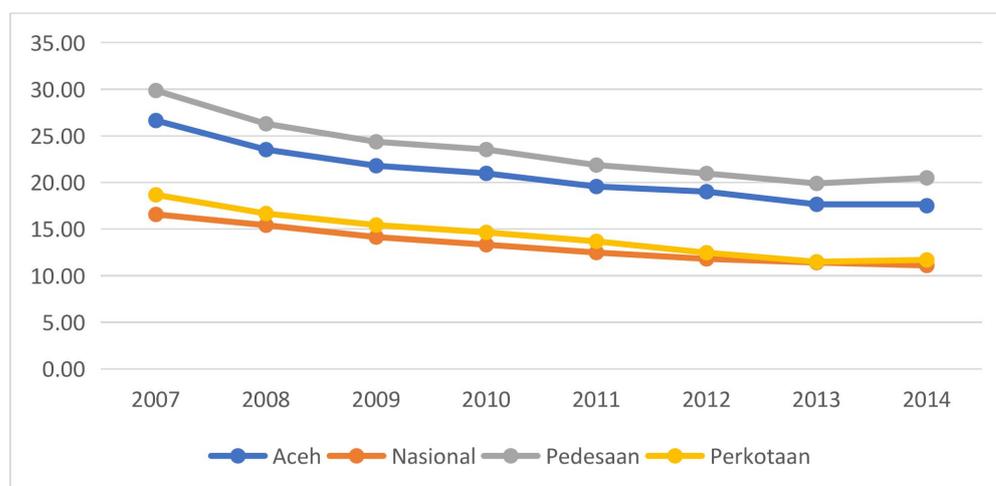
Received: DD/MM/YY; Revised: DD/MM/YY; Accepted: DD/MM/YY

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Aceh sebagai provinsi paling barat di Indonesia terus berjuang untuk keluar dari zona kemiskinan sebagai dampak dari konflik selama 30 tahun dan bencana alam. Meskipun persentase penduduk miskin provinsi Aceh menurun dari tahun ke tahun, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional dan sepuluh besar provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia (BRR NAD-Nias, 2012). Kemiskinan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan merupakan salah satu cakupan dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa yang diwujudkan melalui kondisi kehidupan warganya yang tangguh dengan berasaskan tiga aspek alamiah (trigatra) dan lima aspek sosial (pancagatra) (Subiyanto, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia persentase penduduk miskin provinsi Aceh tahun 2007-2014 selalu berada di atas rata-rata nasional. Persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata di provinsi Aceh serta terlihat ketimpangan dengan persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan.

**Gambar 1.** Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh (Pedesaan, Perkotaan dan Jumlah) dan Nasional tahun 2007-2014



Sumber: BPS 2020, data diolah

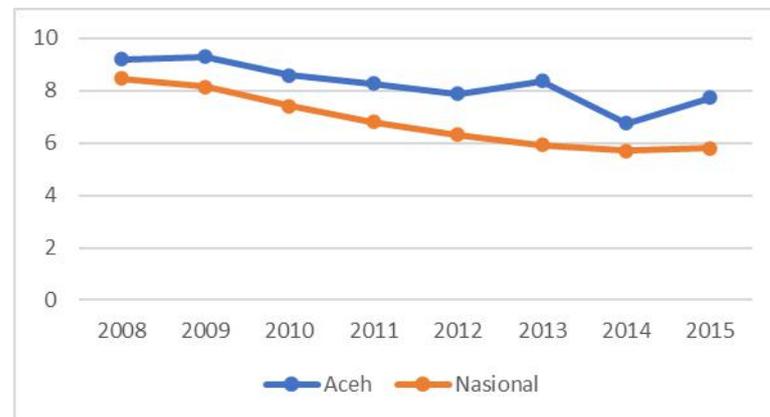
Pemerintah Aceh terus berupaya melaksanakan program-program untuk pengentasan kemiskinan seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 disebutkan bahwa pemerintah Aceh membuka 160 lokasi sebagai upaya pengendalian pengembangan dan pembangunan manusia serta upaya lain seperti pengurangan tingkat pengangguran (Pemerintah Aceh, 2007).

Sampai akhir tahun 1960, ahli ekonomi sepakat bahwa untuk mengejar ketertinggalan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melampaui pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan begitu pendapatan perkapita penduduk akan

meningkat dan akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan (Agustina et. al., 2018).

Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka penduduk di suatu wilayah akan berdampak pada tingkat pengangguran. Perubahan tingkat pengangguran akan berdampak terhadap tingkat kemiskinan, semakin buruk tingkat pengangguran akan berimbas pada menurunnya pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraannya juga ikut menurun sehingga berujung pada meningkatnya kemiskinan (Sukirno, 2000). Tingkat pengangguran di provinsi Aceh pada tahun 2008-2015 masih berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2008-2013, tingkat pengangguran cenderung menurun dan kembali meningkat pada tahun 2014-2015 yang mencerminkan lapangan kerja yang tersedia mampu menyerap angkatan kerja baru selama tahun 2008-2013 (Simreg Bappenas, 2015).

**Gambar 2.** Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2008-2015



Sumber: Simreg Bappenas 2015

Kinerja perekonomian kabupaten/kota bisa dilihat dari nilai PDRB. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Secara ideal, sebaran penduduk seharusnya juga mencerminkan sebaran PDRB di Provinsi Aceh. Nilai PDRB tinggi seharusnya selaras dengan pemerataan pembangunan dengan penduduk tinggi. PDRB perkapita digunakan sebagai indikator untuk melihat lebih jelas sebaran PDRB yang disesuaikan dengan jumlah penduduknya. Dengan struktur ekonomi tidak kompleks dan sektor pertanian masih menjadi sektor dominan seperti Aceh, PDRB perkapita bisa menjadi indikator untuk mencerminkan tingkat kemakmuran penduduk secara makro (Bappeda Aceh, 2014), semakin tinggi PDRB perkapita menandakan lebih banyak pekerjaan dan membuat pendapatan penduduk semakin tinggi. Sehingga memungkinkan pemerintah untuk meraih pajak lebih banyak yang bisa digunakan untuk program pengentasan kemiskinan (Safuridar dan Damayanti, 2018).

Minyak dan gas bumi berperan tinggi dalam menyumbang perekonomian di Aceh. Meskipun nilainya fluktuatif mengikuti harga minyak dunia. Berdasarkan data BPS Provinsi

Aceh pada tahun 2007-2009 nilai PDRB Aceh mengalami penurunan dikarenakan minyak dan gas sebagai salah satu sektor terbesar yang penyumbang PDRB Aceh mengalami penurunan produksi. Sebaliknya saat harga minyak dan gas membaik di tahun berikutnya, nilai PDRB Aceh ikut membaik (Pemerintah Aceh, 2013)

**Tabel 1.** Perkembangan PDRB Aceh Tahun 2009-2011

Sektor	2007 (Triliun)	2008 (Triliun)	2009 (Triliun)	2010 (Triliun)	2011 (Triliun)
Pertanian	8,16	8,22	8,43	8,86	9,35
Pertambangan & Penggalian	7,29	5,31	2,80	2,61	2,61
Industri Pengolahan	4,49	4,12	3,79	3,49	3,56
Listrik, gas & Air Bersih	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13
Konstruksi	2,15	2,16	2,23	2,34	2,49
Perdagangan, Hotel & Restoran	5,67	5,92	6,21	6,61	7,06
Pengangkutan & Komunikasi	2,14	2,17	2,28	2,43	2,62
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,52	0,55	0,59	0,62	0,60
Jasa-jasa	5,48	5,55	5,78	6,03	6,29
PDRB dengan migas	35,98	34,10	32,22	33,12	34,77

Sumber: Bappeda Aceh 2014

Provinsi Aceh memasukkan zakat sebagai sumber pendapatan asli Aceh. Dalam RPJMA 2007-2012 disebutkan bahwa zakat belum dikelola dengan baik karena belum ada peraturan (qanun) yang mengatur lebih lanjut. Setiap tahun realisasi penerimaan zakat terus meningkat, dalam salah satu rumusan hasil Rapat Kerja Baitul Mal se Aceh pada tahun 2017 disepakati penggunaan dana zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) untuk program pengembangan masyarakat diyakini dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan (Husen, 2017).

Pengentasan kemiskinan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan (Sukirno, 2000), menurunnya tingkat pengangguran sebagai dampak dari peningkatan PDRB perkapita sebagai indikator pertumbuhan ekonomi (Bappeda Aceh, 2014) dan keberhasilan pembangunan manusia di provinsi Aceh berdasarkan data BPS ditambah dengan pengelolaan zakat yang tepat sasaran seharusnya bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Dari latar belakang di atas, penulis ingin melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada dengan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS); dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Dua penelitian yang menjadi rujukan yaitu penelitian Ningsih dan Syechalad (2016) serta Ihsan dan Ikhsan (2018) yang membahas mengenai pengaruh pengangguran terhadap pengentasan kemiskinan di provinsi Aceh. Kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh variabel pengangguran terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2004-2014 dan 2008-2015 di provinsi Aceh. Kedua, penelitian mengenai pengaruh IPM terhadap kemiskinan yang

dilakukan oleh Masyithah dan Nasir (2018) di Provinsi Aceh tahun 2001-2017 serta Alhudhori (2017) di provinsi Jambi yang menyimpulkan bahwa IPM di provinsi Aceh dan provinsi Jambi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Ketiga, penelitian pengaruh zakat, infaq dan sadaqah terhadap kemiskinan di provinsi Aceh oleh Afifudin dan Sari (2019) yang menemukan secara parsial zakat berpengaruh sedangkan infaq tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan tahun 2007-2017 serta penelitian Yuliana et. al (2019) menunjukkan bahwa setiap peningkatan zakat, infaq dan sadaqah tahun 20013-2017 sebesar 1% akan menurunkan kemiskinan sebesar 5.06E-08 satuan. Keempat, penelitian Safurindar dan Damayanti (2019) mengenai pengaruh PDRB per kapita dan pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh tahun 2007-2017 yang menyimpulkan bahwa PDRB per Kapita berpengaruh signifikan dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tetapi keduanya berpengaruh negatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada penelitian yang menggunakan tingkat pengangguran terbuka, IPM, ZIS dan PDRB perkapita bersamaan sebagai variabel independent sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti pengaruh keempat variabel tersebut terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh. Penelitian ini meliputi kabupaten/kota di provinsi Aceh dengan rentang waktu 2009-2015. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, IPM, realisasi penerimaan ZIS dan PDRB perkapita kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2009-2015.

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Pembangunan

Teori pembangunan Rostow menyebutkan bahwa proses pembangunan ekonomi masyarakat terdiri dari lima tahapan, tahap pertama masyarakat tradisional, tahap kedua prakondisi sebelum lepas landas menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dimana masyarakat akan mengalami masa transisi untuk mempersiapkan diri menggunakan pertumbuhan yang berkelanjutan, tahap ketiga lepas landas dimana masyarakat akan mengalami perubahan yang signifikan seperti perkembangan di sektor industri, tahap keempat menuju kematangan ekonomi saat kegiatan ekonomi masyarakat sudah dilakukan dengan efisien melibatkan teknologi modern dan tahap kelima pembangunan ekonomi masyarakat bukan lagi dalam konteks produksi tetapi sudah menuju konsumsi massal yang tinggi sebagai ukuran kesejahteraan (Fathurrohman & Nurani, 2019).

### Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang diukur dari sisi ekonomi dan kebutuhan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang masuk ke dalam kategori miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan yang sudah ditetapkan BPS. Garis Kemiskinan merupakan total dari Garis Kemiskinan Makanan setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan Garis Kemiskinan Non Makanan yang diwakili berbagai jenis komoditi.

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel dependen adalah Persentase Penduduk Miskin di 18 kabupaten dan 5 kota provinsi Aceh. Persentase Penduduk Miskin menurut BPS adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

### **Analisis Kebijakan Evaluasi Formal**

Pengentasan kemiskinan berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan publik. Sehingga pendekatan evaluasi kebijakan perlu dilakukan dalam penelitian ini. Kebijakan publik meliputi tiga hal yaitu *input*, proses dan *output* yang terdiri dalam satu kesatuan yang sistematis (Ido, 2018). Lebih lanjut Hasil kebijakan dibedakan antara keluaran (*output*) kebijakan, yakni barang, layanan, atau sumberdaya yang diterima kelompok sasaran kebijakan atau kelompok penerima (*beneficiaries*), dan dampak (*impacts*), yakni perubahan perilaku atau sikap yang nyata yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. (Dunn, 1994:513 dalam La Ode Muhammad Elwan, S., & Pramusinto, A. 2011).

Menurut Dunn, evaluasi dalam kebijakan publik mampu menghasilkan rekomendasi yang bersifat evaluative dengan prinsip-prinsip fokus pada nilai, interpedensi fakta-nilai, berorientasi masa kini dan masa lampau; dan kualitas nilai (Dunn, 2003).

### **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Provinsi Aceh terhadap Persentase Penduduk Miskin dengan menggunakan data panel, yaitu gabungan antara data *time series* dan data *cross section* (data individu). Data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tahun 2009-2015 dan data *cross section* (data individu) yang digunakan merupakan data tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh berupa data Persentase Penduduk Miskin sebagai variable dependen, data 18 kabupaten dan 5 kota di Provinsi Aceh diwakili data Tingkat Pengangguran Terbuka dan data Indeks Pembangunan Manusia; dan data dari Baitul Mal Aceh Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) serta data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah EViews 9 untuk mengolah data panel dan mengukur variabel dependen terhadap empat variabel independent yang sudah disebutkan. Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{ij} = \alpha_0 + X_{1ij} + X_{2ij} + X_{3ij} + X_{4ij} + \epsilon$$

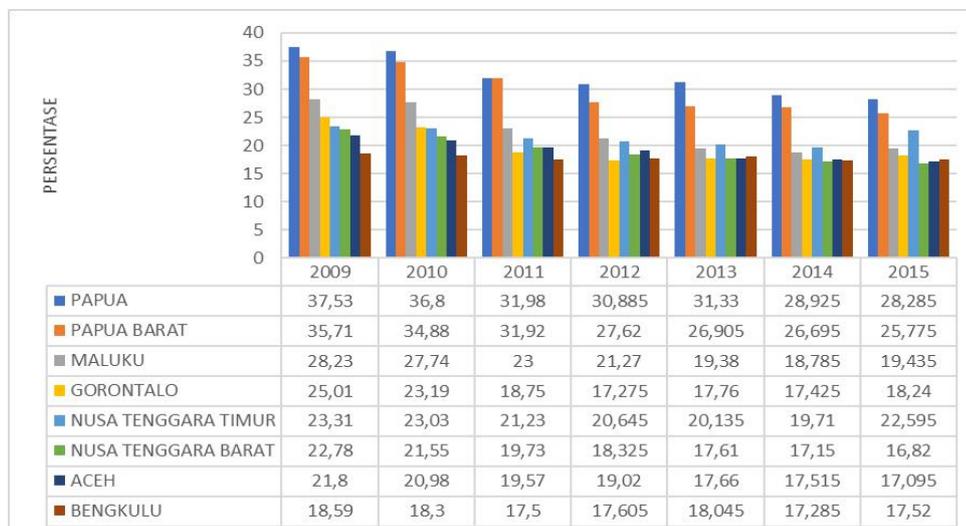
Y adalah Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh per kabupaten/kota tahun 2009-2015 (Persentase);  $X_1$  adalah Tingkat Pengangguran Terbuka per kabupaten/kota tahun 2009-2015 (Persentase);  $X_2$  adalah Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten/kota tahun 2009-2015 (Indeks);  $X_3$  adalah Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) per kabupaten/kota tahun 2009-2015 (rupiah) dan  $X_4$  adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tahun 2009-2015.

Data yang digunakan dalam variabel penelitian ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Directory Baitul Mal Aceh Tahun 2014 dan Tahun 2016; dan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh tahun 2009-2015.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Persentase Penduduk Miskin Badan Pusat Statistik tahun 2009-2015, Provinsi Aceh selalu berada di sepuluh besar provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin tertinggi di Indonesia dan selalu berada di atas rata-rata nasional. Tahun 2019 persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh sebesar 15,17 persen dan rata-rata persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,22 persen. Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan.

**Tabel 2.** Persentase Penduduk Miskin Tahun 2009-2015



Sumber: BPS 2020, data diolah

Meskipun tingkat kemiskinan di Aceh lebih tinggi dibanding beberapa provinsi lain di Indonesia, hal tersebut merupakan sebuah pencapaian mengingat bencana yang pernah terjadi pada tahun 2004. Setelah bencana tsunami, tingkat kemiskinan mulai menurun dan ekonomi Aceh perlahan membaik (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 2012).

Pemerintah Aceh terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan pengurangan tingkat pengangguran dan mengoptimalkan sumber pendapatan seperti

Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya percepatan pertumbuhan, sejak tahun 1976 pemerintah provinsi Aceh telah banyak membuka permukiman baru, tercatat pada tahun 2009 sebanyak 160 lokasi transmigrasi dengan jumlah penempatan sebanyak 41.358 kepala keluarga atau 169.188 jiwa. Pembangunan kependudukan tersebut sebagai upaya pengendalian kualitas dan pengembangan penduduk agar menjadi kekuatan pembangunan (Pemerintah Aceh, 2007). Indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh tahun 2009-2015. Selain kedua variabel tersebut, digunakan juga variabel Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) dan PDRB perkapita sebagai variabel independen. ZIS dipilih sebagai variabel independen dikarenakan potensi zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) di Aceh begitu besar. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, persentase penduduk muslim di provinsi Aceh mencapai 4,4 juta atau 98,14% (BPS, 2012). Data dari Baitul Mal Aceh menyebutkan pada tahun 2017 potensi ZIS di provinsi Aceh 1,4 triliun (Husen, 2017). Sehingga ZIS yang dihimpun Baitul Mal Aceh berpotensi untuk membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

Sebagai provinsi paling barat dan terluar di Indonesia, Aceh memegang peran penting dalam jalur perdagangan internasional, terlebih setelah pelabuhan di Sabang ditetapkan sebagai pelabuhan bebas (Bappeda Aceh, 2014). Hal tersebut tentu membantu menaikkan beberapa sektor ekonomi di Aceh yang membentuk PDRB. PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017, PDRB masuk dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi (Pemerintah Aceh, 2013). Variabel PDRB perkapita dengan migas dalam penelitian ini dipilih untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel-variabel independen yang diasumsikan mempengaruhi peningkatan atau penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh dengan menggunakan regresi data panel tahun 2009-2015. Hal pertama yang dilakukan sebelum melakukan regresi data panel adalah menyamakan skala pengukuran data pada setiap variabel dengan proses transformasi data. Dalam penelitian ini, transformasi data dengan menggunakan logaritma (log) adalah variabel jumlah realisasi penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan variabel jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Skala pada kedua variabel tersebut menggunakan satuan rupiah. Dua variabel independen lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan variabel independen yaitu Persentase Penduduk Miskin tidak dilakukan transformasi data karena menggunakan satuan indeks dan persentase.

Setelah transformasi data dilakukan, untuk memulai proses analisis regresi data panel akan dilakukan proses pemilihan model panel terbaik dari tiga model panel data yang ada dalam regresi data panel yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, *Random Effect Model* dengan menggunakan perangkat analisis ekonometrika EViews 9. Pada langkah ini akan dilakukan dua uji model, yakni Uji Chow dan Uji Hausman. Uji model pertama yaitu Uji Chow untuk memilih model panel data terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Jika *Fixed Effect Model* terpilih menjadi model terbaik, akan dilanjutkan uji model yang kedua yaitu Uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Jika *Fixed Effect Model* masih menjadi model terbaik maka uji model selesai.

**Tabel 3.** Pemilihan Model Panel Data Terbaik

Uji Model	Hasil	Keterangan
CEM vs FEM	F (83,75) = 83; Prob 0,0000 Nilai Prob 0,0000 < $\alpha$ 0,05 maka H <sub>0</sub> ditolak dan H <sub>1</sub> diterima = FEM yang sesuai	Uji Chow
REM vs FEM	Chi-Sq = 17,06; Prob 0,0019 Nilai Prob 0,0019 < $\alpha$ 0,05 maka H <sub>0</sub> ditolak dan H <sub>1</sub> diterima = FEM yang terbaik	Uji Hausman

Sumber: Data diolah dengan EViews 9, 2019

Dari dua uji model dalam tabel diatas diketahui hasil Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < \alpha 0,05$  artinya H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, dimana H<sub>0</sub> adalah *Common Effect Model* dan H<sub>1</sub> adalah *Fixed Effect Model*. Maka *Fixed Effect Model* lebih baik dari *Common Effect Model*. Uji model kedua yaitu Uji Hausman menghasilkan menghasilkan nilai probabilitas sebesar  $0,0019 < \alpha 0,05$  artinya H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, dimana H<sub>0</sub> adalah *Random Effect Model* dan H<sub>1</sub> adalah *Fixed Effect Model*. Maka *Fixed Effect Model* lebih baik dari *Random Effect Model*. Dari kedua pengujian model tersebut didapatkan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model panel data terbaik. *Fixed Effect Model* ditetapkan sebagai model panel yang paling sesuai untuk digunakan dalam menggambarkan kondisi riil pada penelitian ini.

Setelah model panel data terbaik ditemukan maka selanjutnya akan dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan model yang terpilih merupakan model yang menggambarkan situasi riil untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Karena *Fixed Effect Model* yang terpilih, maka perlu dilakukan dua uji asumsi klasik yaitu Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas.

**Tabel 4.** Uji Asumsi Klasik

Uji Model	Hasil	Keterangan
Multikolinearitas	Korelasi antar variabel independen < $\alpha$ 0,8	Terdistribusi normal
Heteroskedastisitas	Nilai Prob variabel dependen dan independen > $\alpha$ 0,5	Terdistribusi normal

Sumber: Data diolah dengan EViews 9, 2019

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model yang sudah terpilih dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Akan dilakukan dua uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas. Sedangkan dua uji asumsi klasik lainnya yaitu uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi tidak wajib karena data bersifat panel. Dari kedua uji asumsi klasik yang sudah dilakukan diketahui bahwa data terdistribusi dengan normal dan tidak terjadi permasalahan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini dapat mewakili kondisi riil di lapangan. Persamaan regresi data panel dengan model panel data *Fixed Effect Model* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 84.47336863263989 - 0.1050950548499872 * X_1 + 0.2410264640464136 * X_2 - 1.190089770139465 * \ln X_3 - 3.291395415258579 * X_4$$

Prob (F-Stat) 0.000000; t-stat (P-Value) : X1 (0.0056), X2 (0.0000), LnX3 (0.0000), LnX4(0.0000).

Dengan Y adalah Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh per Kabupaten/Kota tahun 2009-2015; X<sub>1</sub> adalah Tingkat Pengangguran Terbuka per Kabupaten/Kota tahun 2009-2015; X<sub>2</sub> adalah Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota tahun 2009-2015; LnX<sub>3</sub> adalah realisasi penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah per Kabupaten/Kota tahun 2009-2015; dan LnX<sub>4</sub> adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita per Kabupaten/Kota tahun 2009-2015.

Selanjutnya, dilakukan membaca hasil perhitungan yang didapat dengan menggunakan Koefisien Determinasi, Uji F, Uji t dan menginterpretasi model regresi data panel. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan. Uji F didasarkan pada hasil perhitungan *Fixed Effect Model* dengan melihat nilai Probabilitas (F-Stat). dari perhitungan *Fixed Effect Model* dihasilkan Probabilitas (F-Stat) sebesar 0.000000 dan lebih kecil dari  $\alpha$  0,5, menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh seluruh variabel independen dilihat dari Nilai *Adjusted R-squared* yaitu sebesar 95,11% yang menunjukkan bahwa secara umum keempat variabel independen mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 95,11% dan sisanya 0,49% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya dilakukan Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial. Berdasarkan hasil perhitungan *Fixed Effect Model* keempat variabel independen memiliki *p-value* lebih kecil dari  $\alpha$  0.05. Artinya keempat variabel secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2009-2015, dengan *p-value* masing-masing 0.0056 untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka dan 0.0000 untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia, variabel Zakat, Infaq dan Shadaqah; dan variabel Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

### **Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan**

Pengangguran merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang mempengaruhi

masyarakat secara langsung dan berefek domino. Seperti situasi pandemi Covid-19 saat ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan sedang mencari kerja. Orang tersebut berarti akan mengalami penurunan standar hidup dan memiliki tekanan psikologis. Semakin lama dan banyak orang menganggur maka akan meningkatkan Persentase Penduduk Miskin. Sehingga kebijakan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dapat membantu menurunkan Persentase Penduduk Miskin suatu wilayah.

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini diketahui bahwa koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar -0.105095 artinya untuk setiap peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1% maka akan mempengaruhi penurunan Persentase Penduduk Miskin sebesar 0.105095 satuan. *p-value* sebesar 0.0056 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Hasil ini menguatkan beberapa penelitian sebelumnya di Provinsi Aceh yang menemukan bahwa pada tahun 2004-2014 jika tingkat pengangguran terbuka meningkat 1% akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,23473 satuan (Ningsih dan Syechalad, 2016) dan penelitian oleh Ihsan dan Ikhsan (2018) yang meneliti pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan tahun 2008-2015 yang menemukan bahwa jika pengangguran meningkat 1% akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.156279 satuan. Hal ini bisa terjadi karena konsep pengangguran terbuka yang digunakan BPS adalah bukan penduduk miskin tetapi orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari, mempersiapkan, mendapatkan pekerjaan atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

### **Analisis Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan**

Menurut Badan Program Pembangunan dibawah PBB (UNDP) ada korelasi antara pembangunan manusia disuatu wilayah dan tingkat kemiskinan dimana banyaknya penduduk miskin ikut berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Pada umumnya penduduk miskin dihadapkan dengan keterbatasan pada faktor produksi yang berdampak terhambatnya akses terhadap aktifitas ekonomi. Sehingga mengambat juga untuk meraih pendapatan yang cukup dan akhirnya pendapatan tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Jika kebutuhan dasar saja sulit, untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan menjadi lebih sulit. (Mukarramah et.al., 2019)

Hasil pengolahan data IPM kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2009-2015 didapat koefisien IPM sebesar 0.241026 dan *p-value* 0.0000. artinya variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh karena *p-value* lebih kecil dari  $\alpha$  0.05. Koefisien IPM dapat diinterpretasikan jika terjadi peningkatan IPM sebesar 1% maka akan meningkatkan Persentase Penduduk Miskin sebesar 0.241026 satuan.

Hasil ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Sudirman, 2016) dan setiap peningkatan IPM sebesar 1% di provinsi Aceh tahun 2001-2017 akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.08838 satuan (Masyithah dan Nasir, 2018). Beberapa penelitian mengenai hubungan IPM dan kemiskinan yang dilakukan diluar provinsi Aceh oleh Kharisma et. al (2020) di provinsi Papua menyimpulkan untuk setiap peningkatan kemiskinan sebesar 1% akan menurunkan IPM sebesar 0.122477 satuan dan oleh Alhudhori (2017) di provinsi Jambi yang menemukan IPM berpengaruh positif dengan kemiskinan dengan kenaikan kemiskinan sebesar 0.358 satuan. Peningkatan IPM di Provinsi Aceh selama rentang waktu 2009-2015 tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan, sebaliknya dalam penelitian ini menunjukkan kemiskinan meningkat. Hal tersebut bisa disebabkan pembangunan manusia yang mencakup tiga hal kesehatan, Pendidikan dan perekonomian belum mampu mengangkat status ekonomi masyarakat diatas garis kemiskinan menjadi sejahtera. Kesenjangan IPM antar kabupaten/kota di provinsi Aceh juga bisa menjadi salah satu penyebabnya.

#### **Analisis Pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqah terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, persentase muslim terbanyak berada di Provinsi Aceh dengan 98,14% dan jumlah penduduk muslim sebesar 4,4 juta jiwa (BPS, 2012). Jika persentase penduduk miskin Dalam berbagai literatur Fikih ditemukan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk melengkapi puasa Ramadan dan zakat maal jika sudah mencapai *nishab*. Serta dianjurkan memberikan Shadaqah dan infaq. Undang-undang No.11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh juga memasukan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dengan potensi yang begitu besar, zakat, infaq dan Shadaqah bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Aceh.

Jika dilihat dari hasil pengolahan data panel Zakat, Infaq dan Shadaqah tahun 2009-2015 didapat koefisien sebesar -1.190090 artinya jika realisasi penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah meningkat 1% maka akan menurunkan Persentase Penduduk Miskin sebesar 1.190090 satuan. *P-value* Zakat, Infaq dan Shadaqah sebesar 0.0000 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki pengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin tahun 2009-2015.

Hasil tersebut berkorelasi positif dengan laporan tahunan Baitul Mal dimana dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibagi menjadi dua basis yaitu basis program untuk pendidikan, Kesehatan, ekonomi sosial dan dakwah serta berbasis asnaf sesuai delapan golongan yang berhak menerima dengan porsi terbesar digunakan untuk fakir dan miskin. Dalam laporan tersebut juga pendayagunaan ZIS berbasis program juga digunakan untuk pelatihan keterampilan kepada pemuda/pemudi dari keluarga miskin, bantuan zakat produktif, pembangunan rumah fakir-miskin, bantuan

Pendidikan dan beasiswa santri keluarga miskin; dan santunan bulanan kepada anak-anak dari keluarga miskin. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliana et. al (2019) dengan data ZIS provinsi Aceh tahun 2013-2017 menyimpulkan setiap peningkatan ZIS sebesar 1% akan menurunkan kemiskinan sebesar 5.06E-08 satuan.

### **Analisis Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Kemiskinan**

PDRB per kapita banyak dipakai sebagai indikator kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita mewakili rata-rata kinerja perekonomian penduduknya. Semakin tinggi pendapatan penduduknya maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut semakin baik. Jika kesejahteraan penduduk semakin membaik, maka jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin menurun. Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan model data panel *Fixed Model Effect* menghasilkan variabel PDRB per Kapita memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil perhitungan dan pengolahan data panel menggunakan EViews 9 memperlihatkan koefisien PDRB per kapita sebesar -3.291395 artinya setiap peningkatan PDRB per kapita sebesar 1% maka akan menurunkan Persentase Penduduk Miskin sebesar 3.291395 satuan. Nilai *p-value* variabel PDRB per kapita sebesar 0.0000 dan lebih kecil dari  $\alpha$  0.05 berarti variabel PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di provinsi Aceh dengan data tahun 2012-2017 yang menyimpulkan PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Fardilla, 2019) dan penelitian dengan data tahun 2007-2017 yang menemukan bahwa setiap kenaikan PDRB per kapita 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 1.346 satuan (Safuridar dan Damayanti, 2018). Penelitian lainnya diluar provinsi Aceh yang menemukan bahwa PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan yaitu penelitian oleh Sutrisna dan Pratiwi (2014) di provinsi Bali.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah *pertama*, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keempat variabel independen memiliki *p-value* dibawah ambang batas sehingga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Papua pada tahun 2009-2015. Namun hanya variabel ZIS dan PDRB perkapita yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien masing-masing variabel -1.190090 dan -3.291935, artinya setiap peningkatan ZIS dan PDRB sebesar 1% akan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1.190090 dan 3.291935 satuan. Sedangkan variabel tingkat pengangguran dan IPM bertolak belakang dengan tingkat pengangguran dimana setiap peningkatan tingkat pengangguran justru berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.105095 satuan dan peningkatan IPM juga berkontribusi untuk peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0.241026 satuan.

*Kedua*, hasil *adjusted R-square* dalam *Fixed Effect Model* mendapatkan nilai sebesar 95,11% artinya secara simultan dan umum keempat variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh pada tahun 2009-2015 sebesar 95,10% dan sisanya sebesar 4,9% tingkat kemiskinan dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini. Nilai F-statistik dan *p-value* dalam hasil regresi data panel juga menunjukkan nilai sebesar 120.7522 dan 0.0000. artinya variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini.

## **SARAN**

Meskipun berbagai upaya dilakukan pemerintah provinsi Aceh untuk mengoptimalkan pendapatan yang dimiliki seperti ZIS dan PDRB dan pendapatan dari dana otonomi khusus sejak 2008 yang digunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan seperti pembangunan manusia dan membuka lapangan pekerjaan. Persentase Penduduk Miskin di provinsi Aceh masih berada di sepuluh besar provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Saran yang bisa diberikan dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, pemerintah provinsi Aceh perlu memfokuskan program pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan sesuai rekomendasi BRR NAD-Nias dalam laporan tahun 2008. *Kedua*, berdasarkan hasil penelitian ini dan beberapa penelitian sebelumnya, ZIS dan PDRB perkapita memiliki dampak dalam menurunkan tingkat kemiskinan sehingga potensi ZIS yang begitu besar sebagai dampak dari persentase penduduk muslim besar perlu dioptimalkan baik dengan ZIS satu pintu melalui Baitul Mal Aceh atau melalui mekanisme lain yang dianggap cocok dengan situasi sosial-budaya masyarakat Aceh. Pemerintah provinsi Aceh juga perlu untuk menemukan sumber pendapatan lain diluar migas yang lebih berkelanjutan agar ketika migas berhenti memproduksi tidak mempengaruhi PDRB perkapita provinsi Aceh.

Keterbatasan yang penulis hadapi dalam melakukan penelitian ini adalah tidak adanya data tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 di website BPS dan website resmi provinsi Aceh sehingga penelitian hanya bisa dilakukan tahun 2009-2015, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat melanjutkan data panel tahun 2009-2019. Data yang terpisah juga mengharuskan penelitian selanjutnya harus lebih jeli memilih data yang cocok dimasukan seperti data ZIS dari Baitul Mal, bukan data ZIS dari BPS provinsi Aceh. Kesulitan mendapatkan data dana otonomi khusus provinsi Aceh yang disalurkan kepada 23 kabupaten/kota menjadi salah satu keterbatasan penelitian ini. Berdasarkan penelusuran di *Google Scholar* baru ada satu penelitian pengaruh dana otonomi khusus terhadap kemiskinan oleh Halim (2013). Penelitian selanjutnya bisa memasukkan dana otonomi khusus sebagai variabel independen jika nanti sudah tersedia di website resmi provinsi Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, B. M. (2014). *Baitul Mal Directory 2014*.
- Aceh, B. M. (2016). *Baitul Mal Directory 2016*.
- Afifudin, T., & Sari, N. (2019). Pengaruh Zakat, Infaq Terhadap Penurunan Kemiskinan di Aceh Periode 2007-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 34-51.
- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265-283.
- Alhudhori, M. (2017). Pengaruh IPM, PDRB Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1(1), 113-124.
- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias. (2012). *Kajian Kemiskinan di Aceh (Dampak Konflik, Tsunami, dan Rekonstruksi Terhadap Kemiskinan di Aceh)*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh. (2014). *Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh tahun 2013*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2019*. Diakses pada 26 Mei 2020. Retrieved from <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Survey Penduduk Nasional 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2006). *Rencana Kerja Pemerintah*. Diakses pada 26 mei 2020. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/files/2113/5228/3473/bab-33-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-nanggroe-aceh-darussalam-nad-dan-sumatera-utara.pdf>.
- Bappenas. (2006). *Rencana Kerja Pemerintah*. Diakses pada 26 mei 2020. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/files/2113/5228/3473/bab-33-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-nanggroe-aceh-darussalam-nad-dan-sumatera-utara.pdf>.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Ido, I. (2018). Dampak Kebijakan Pembangunan Smelter terhadap Eksistensi dan Pendapatan Tenaga Kerja Lokal Pertambangan di Kabupaten Konawe Selatan. *Journal Publicuho*, 1(2), 64-73.
- Fardilla, S. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan, Listrik, Sekolah dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Aceh. *ETD Unsyiah*.
- Fathurrohman, D. M., & Nurani, F. (2019). *Upaya Pembangunan Infrastruktur dalam*

- Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Diakses pada 26 Mei 2020. Retrieved from <http://blog.ub.ac.id/dwikimadyablog/files/2019/12/upaya-pembangunan-infrastruktur-dalam-pembangunan-ekonomi-di-inonesia.pdf>.
- Halim, A. (2013). *Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2012*. Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada.
- Husen, Sayed Muhammad. (2017). Zakat Berdayakan Umat. Diakses pada 27 Mei 2020. Retrieved from <https://baitulmal.acehprov.go.id/2017/11/20/zakat-berdayakan-ummat>.
- La Ode Muhammad Elwan, S. (2011). Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010. Universitas Gadjah Mada.
- Ihsan, K., & Ikhsan, I. (2018). Analisis Pengaruh UMP, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 408-419.
- Kharisma, V. D., Samputra, P. L., & Muntaha, P. Z. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. *Journal Publicuho*, 3(1), 1-20.
- Masyithah, N., & Nasir, M. (2018). Pengaruh Belanja Langsung Dan IPM Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 547-554.
- Mukarramah, Yolanda, C., & Zulkarnain, M. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 105-117.
- Ningsih, F. A. S., & Syechalad, M. N. (2016). Analisis Pengaruh Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 545-554.
- Pemerintah Aceh. (2007). *RPJMA 2007-2012*.
- Pemerintah Aceh. (2012). *RPJMA 2012-2017*.
- Safuridar, S., & Damayanti, M. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan dan PDRB per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 180-187.
- Simreg Bappenas. (2015). *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Aceh 2015*. Jakarta: Bappenas.
- Subiyanto, A., Boer, R., Aldrian, E., Perdinan, P., & Kinseng, R. (2018). Isu Perubahan Iklim Dalam Konteks Keamanan Dan Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(3), 287-305.
- Sudirman, M. N. (2016). Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *ETD Unsyiah*.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisna, K., & Pratiwi, S. (2014). Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja, Pendidikan, dan PDRB Per Kapita terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(10), 44484.
- Yuliana, Y., Adamy, Y., & Adhila, C. (2019). Pengaruh Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 6(2), 203-214.
- Undang-undang No.11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh.